

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Biro Hukum Setda Provinsi NTB
2. Tugas : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan bahan/ materi perumusan kebijakan daerah,
3. Fungsi :
 - a. Perumusan bahan/ materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum
 - b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum
 - c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Hukum
 - d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran dan Sumber Data)
1.	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas - Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas - Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama - Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Pengukuran = Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas dibagi Jumlah Produk Hukum dikali 100 % yang dikatakan berkualitas adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak Tumpang tindih dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. Tidak Bertentangan dengan Undang-undangan lebih tinggi c. Tidak ada uji materi/yudicial review d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sosial dan HAM e. Tidak menghambat Investasi di Daerah - Formulasi Pengukuran = Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas dibagi Jumlah Produk Hukum dikali 100 % yang dikatakan berkualitas adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak Tumpang tindih dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi b. Tidak Bertentangan dengan Undang-undangan lebih tinggi c. Tidak ada uji materi/yudicial review d. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sosial dan HAM e. Tidak menghambat Investasi di Daerah - Formulasi Pengukuran = Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Pertama dikali 100 % - Formulasi Pengukuran = Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Banding dikali 100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi - Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi - Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Pengukuran = Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Kasasi dikali 100 % - Formulasi Pengukuran = Jumlah Perkara Non Litigasi yg dimediasi dibagi Perkara hukum non litigasi yang diajukan ke Biro Hukum dikali 100 % - Formulasi Pengukuran = Jumlah Produk Hukum di Web JDIH dan Medsos yang diakses masyarakat dibagi jumlah Produk Hukum yang diupload di web JDIH dikali 100 %

Mataram,

2023

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB,



RUDY GUNAWAN, SH.MH.

Pembina Ek. I (IV/b)

NIP. 1996031002